



## Dampak Sosial dan Ekonomi Pariwisata dari Konflik Rempang

Renza Fahlevi<sup>\*1</sup>, Ika Suryono Djunaid<sup>2</sup>, Fitriana Aidnilla Sinambela<sup>3</sup>, Sundring Pantja Djati<sup>4</sup>,  
Myrza Rahmanita<sup>5</sup>

<sup>1,3</sup>Universitas Internasional Batam, <sup>2</sup>Universitas Bunda Mulia, <sup>4,5</sup>Institut Pariwisata Trisakti, Indonesia

E-mail: [renza.fahlevi@uib.ac.id](mailto:renza.fahlevi@uib.ac.id)

Article Info	Abstract
<b>Article History</b> Received: 2024-01-11 Revised: 2024-02-23 Published: 2024-03-13  <b>Keywords:</b> <i>Rempang Island;</i> <i>Social;</i> <i>Economic Tourism.</i>	Batam is a city that has great potential in the manufacturing and tourism industry. This is because the city of Batam collides directly with Singapore and Malaysia. At the end of 2023, a conflict occurred on Rempang Island which became a challenge in developing the manufacturing and tourism industry in the city of Batam. This research aims to identify the social and economic impacts of tourism that emerged as a result of the conflict that occurred on Rempang Island. The research method uses primary data sourced from interviews and secondary data sourced from articles related to the research topic. The research results concluded that the conflict on Rempang Island had a negative impact on the social life of the community and had a negative impact on tourism economic activities. It is hoped that the research results can contribute to related parties as secondary data for making policies related to agrarian conflicts so that similar conflicts can be avoided in the future.
Artikel Info	Abstrak
<b>Sejarah Artikel</b> Diterima: 2024-01-11 Direvisi: 2024-02-23 Dipublikasi: 2024-03-13  <b>Kata kunci:</b> <i>Pulau Rempang;</i> <i>Sosial;</i> <i>Ekonomi Pariwisata.</i>	Batam merupakan salah satu kota yang mempunyai potensi besar dalam industri manufaktur dan pariwisata. Hal ini karena kota Batam berbatasan langsung dengan negara Singapura dan Malaysia. Pada akhir tahun 2023 terjadi konflik di pulau Rempang yang menjadi tantangan dalam pengembangan industri manufaktur dan pariwisata kota Batam. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dampak sosial dan ekonomi pariwisata yang muncul akibat dari konflik yang terjadi di pulau Rempang. Metode penelitian menggunakan data primer yang bersumber dari wawancara dan data sekunder yang bersumber dari artikel yang terkait dengan topik penelitian. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa konflik di pulau Rempang memberikan dampak negatif terhadap kehidupan sosial masyarakat serta berdampak negatif terhadap kegiatan ekonomi pariwisata. Hasil penelitian diharapkan dapat berkontribusi kepada pihak terkait sebagai data sekunder untuk pengambilan kebijakan terkait konflik agraria sehingga dapat menghindari terjadinya konflik serupa dikemudian hari.

### I. PENDAHULUAN

Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) berhasil menjadi provinsi dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi se-Sumatera, bahkan provinsi Kepri masuk kedalam kumpulan provinsi dengan kenaikan pertumbuhan ekonomi terbesar se-Indonesia. Pada triwulan pertama pada tahun 2023, pertumbuhan ekonomi Kepri menyentuh diangka 6,51%, pertumbuhan ini berada diperingkat keempat tertinggi se-Indonesia. Lebih lanjut dalam laporan yang dirilis oleh Bank Indonesia menyatakan bahwa salah satu kenaikan ekonomi berasal dari industri manufaktur logam, elektronik, optik dan alat angkut laut ([bi.go.id](http://bi.go.id), 2023).

Provinsi Kepri merupakan provinsi yang terdiri dari lima kabupaten dan dua kota. Kota Tanjung pinang merupakan ibu kota provinsi, namun kota Batam merupakan kota perdagangan

yang menunjang perekonomian provinsi Kepri. Penilaian kota Batam sebagai lokomotif ekonomi salah satunya disebabkan kontribusi kota Batam dari sisi ekspor yaitu kontribusi terbesar dibandingkan kota dan kabupaten lain yang ada di provinsi Kepri ([bpbatam.go.id](http://bpbatam.go.id), 2023a). Penunjukan kota Batam sebagai kota ekonomi di provinsi Kepri bukan tanpa sebab. Hal ini karena Batam mempunyai kawasan industri terbanyak dibandingkan kota dan kabupaten yang ada di provinsi Kepri. Setidaknya saat ini terdapat 26 kawasan industri yang ada di kota Batam, bahkan kawasan industri ini sudah dibangun sejak tahun 1990 (Bapenas, 2023).

Pertumbuhan ekonomi kota Batam tidak hanya disokong dari industri manufaktur. Sektor pariwisata turut memberikan andil bagi pertumbuhan ekonomi kota Batam. Dari informasi yang dirilis oleh pemerintah kota

Batam menyebutkan bahwa setidaknya 102.000 kunjungan wisatawan mancanegara ke provinsi Kepri pada September 2023, 80 persen berasal dari pintu masuk kota Batam (Diskominfo Batam, 2023). Dalam rangka menjaga konsistensi pertumbuhan ekonomi kota Batam, maka pemerintah kota Batam berusaha untuk dapat menyelaraskan antara perkembangan industri manufaktur dengan industri pariwisata. Bukti dari implementasi kebijakan ini adalah konsistensi pelaksanaan pembangunan infrastruktur dan fasilitas penunjang oleh pemerintah kota Batam (bpbatam.go.id, 2023b). Pelaksanaan pembangunan infrastruktur dan fasilitas lainnya diyakini akan menjadi daya tarik bagi investor untuk berinvestasi dan juga daya tarik bagi wisatawan untuk melancong ke kota Batam.

Daya tarik kota Batam sebagai kota manufaktur dan pariwisata terbesar di provinsi Kepri mengalami gejolak ketika terjadi rencana proyek pembangunan Eco city pada tahun 2023. Pemerintah pusat berencana untuk menerima proyek strategis dengan investasi besar pada pulau Rempang. Proyek ini melibatkan PT Makmur Elok Graha (MEG) dan Xinyi Group yang berencana untuk berinvestasi dalam bidang wisata, perdagangan dan kawasan industri (Saly dan Ekalia, 2023). Rencana investasi besar ini mendapat penolakan dari masyarakat pulau Galang dan Rempang. Hal ini karena masyarakat diwajibkan untuk meninggalkan pulau dan bersedia untuk direlokasi ditempat lain oleh pemerintah. Lebih lanjut penolakan ini menimbulkan konflik fisik antara masyarakat dengan aparat (Habiba et al, 2023). Secara garis besar, penelitian terdahulu menjelaskan dampak besar dari konflik pulau Rempang dan Galang, dimulai dari dampak sosial kemasyarakatan (Saly dan Ekalia, 2023; Abbas, 2023; Ayuningmas et al., 2023) dan hukum serta pelanggaran Hak Asasi Manusia (Habiba et al, 2023).

Penelitian ini berusaha untuk membahas dampak pembangunan proyek Eco city dari perspektif sosial, ekonomi dan pariwisata. Hasil penelitian diharapkan akan menjadi data sekunder bagi pemegang kepentingan untuk menyusun strategi yang tepat dalam menghadapi konflik yang terjadi di pulau Rempang dan sebagai data sekunder untuk pengambilan kebijakan tentang pembangunan proyek strategis yang berpotensi menimbulkan konflik dengan masyarakat tempatan.

## II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan dua sumber data yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara kepada masyarakat kota Batam memiliki dampak terhadap rencana pembangunan Eco city di pulau Rempang. Narasumber dinilai merupakan salah satu pihak yang terkena dampak sosial dan pariwisata terhadap rencana pembangunan Eco city di pulau Rempang. Selain itu wawancara juga dilakukan kepada pelaku pariwisata di kota Batam. Pelaku pariwisata terdiri dari pengusaha biro perjalanan wisata dan juga pengusaha transportasi wisata yang ada di kota Batam. Kedua pihak ini merupakan salah satu pihak yang dianggap menerima dampak langsung atas terjadinya demonstrasi penolakan investasi di pulau Rempang. Data sekunder berasal dari artikel pendukung yang diperoleh dari penelitian terdahulu yang bersumber dari jurnal penelitian. Selain itu data sekunder juga diperoleh dari berita dan informasi yang bersumber dari media massa dan media pemerintahan yang berkaitan dengan topik penelitian.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Hasil Penelitian

Secara historis penduduk pulau Rempang dan Galang diperkirakan sudah ada sejak tahun 1840an. Penduduk asli pulau Rempang dan Galang mempunyai kedekatan dan juga kemiripan dengan penduduk yang ada di Johor Malaysia (Ayuningmas et al, 2023). Melihat fakta ini dapat disimpulkan bahwa penduduk yang ada di pulau Rempang sudah ada jauh sebelum Indonesia menyatakan kemerdekaannya. Tentunya para masyarakat tempatan merasa berhak untuk mendiami tanah yang ada di pulau Rempang. Rencana pembangunan proyek Eco city membutuhkan lahan yang besar dan akan langsung bersinggungan dengan masyarakat tempatan yang ada di pulau Rempang. Kebutuhan lahan untuk kebutuhan investasi dengan cara menggusur tanah masyarakat akan menjadi konflik argaria (Triani et al., 2023) dan pada akhirnya memicu konflik fisik antara aparat dengan masyarakat pulau Rempang. Bahkan konflik ini memicu persatuan suku Melayu diluar provinsi Kepri untuk berorasi dan berdemonstrasi di kantor BP Batam (Habiba et al, 2023).

Peranan aparat keamanan yang seharusnya menciptakan kondisi yang kondusif tercoreng karena tindakan represif aparat saat berusaha untuk melakukan relokasi masyara-

kat Rempang. Pada tanggal 7 september 2023, aparat gabungan TNI, Polri, Satuan polisi pamong praja terlibat bentrokan dengan masyarakat yang menolak untuk dilakukan penggusuran (Abbas, 2023). Tindakan aparat juga mendorong terjadinya demonstrasi lanjutan yang terjadi pada 11 september 2023 di kawasan Batam center (Habiba et al, 2023). Demonstrasi pada tanggal 11 september 2023 berakhir ricuh dan berdampak pada kegiatan ekonomi dan pariwisata.

Perencanaan proyek pembangunan Eco city juga dinilai tanpa melaksanakan kajian mendalam tentang dampak sosial dan ekonomi terhadap masyarakat tempatan. Pemerintahan kota Batam hanya melibatkan peranan lembaga pendidikan untuk berfokus pada penyiapan kualitas dan kemampuan masyarakat untuk dijadikan pekerja dalam menyongsong kedatangan investasi (bpb Batam.go.id, 2023c). Padahal salah satu topik dari kajian yang paling penting untuk diteliti adalah tentang tanggapan masyarakat tempatan terhadap rencana pembangunan proyek Eco city. Hal ini selaras dengan Undang-Undang Peraturan Dasar Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960, dimana masyarakat adat berhak berpartisipasi dalam menentukan perencanaan, pengembangan, dan pemanfaatan secara berkelanjutan atas Wilayah Adatnya sesuai dengan kearifan lokal (Fuzain, 2023).

## B. Pembahasan

### 1. Dampak sosial masyarakat

Kegagalan pemerintah pusat dan pemerintah kota Batam dalam mengelola konflik yang terjadi menimbulkan dampak sosial dimasyarakat. Sentimen masyarakat pulau Rempang terhadap pemerintah meluas hingga menjadi konflik terbuka, bahkan konflik ini meluas hingga melibatkan banyak pihak dari daerah lainnya. Beberapa perwakilan Lembaga Melayu dari daerah lain datang ke kota Batam untuk mendukung masyarakat tempatan pulau Rempang atas penolakan rencana penggusuran. Dukungan ini ditunjukkan dengan berorasi di depan kantor BP Batam (Hamapu, 2023). Bagi masyarakat pulau Rempang pemerintah dinilai lebih memihak kepada investor dan asing daripada berpihak ke masyarakat terhadap rencana pembangunan Eco city. Penilaian ini muncul akibat dari respon beberapa

pejabat pemerintahan dalam menyikapi rencana pembangunan Eco city.

Dikutip dari Batamnow.com (2023), Walikota Batam yang merangkap sebagai ex-officio BP Batam pernah berpidato didalam acara Dharma Wanita Persatuan (DPW) Batam dengan menyebutkan:

*"Ibu sampaikan pada mereka, maaf saya bukan menghina, ibu boleh lihat rumah mereka sekarang ini. Kalau ibu suruh beli, berapa harga berani ibu beli? Ute, berapa harga rumah situ yang di bibir pantai semua itu? Satu rumah kira-kira jual berapa? Rumah kayu lah. Rp 35 juta. Rp 10 juta pun ibu tak mau beli. Betul? Tapi hari ini kita ganti Rp 120 juta. Berarti saya menaikkan taraf hidup dan harga diri mereka. Itu pun kena marah juga"*

Pernyataan diatas membuat mayoritas penduduk pulau Rempang menjadi tersinggung terhadap penilaian yang diberikan atas rumah yang dimiliki oleh masyarakat pulau Rempang (Ashab, 2023). Masyarakat pemilik rumah di pesisir pulau Rempang merasa terhina dengan penilaian walikota Batam. Secara sosial, pernyataan diatas dapat menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemimpin yang dimiliki. Selain itu, permasalahan konflik pulau Rempang turut serta berimbas kepada kehidupan bersosial masyarakat. Konflik yang berkepanjangan membuat masyarakat pulau Rempang menjadi takut dalam menjalani kehidupan (Solidaritas untuk pulau rempang, 2023, hal. 25). Lebih lanjut dalam laporan ini dijelaskan bahwa kehidupan sosial masyarakat pulau Rempang menjadi terganggu akibat tidak bekerjanya sebagian masyarakat pulau Rempang.

### 2. Dampak Ekonomi Pariwisata.

Batam merupakan kota tujuan wisata baik bagi wisatawan lokal maupun bagi wisman. Dibandingkan dengan kota dan kabupaten lain yang ada di provinsi Kepri, kota Batam menduduki peringkat pertama sebagai destinasi wisata. Namun demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa konflik yang terjadi di pulau Rempang turut berpengaruh bagi pelaku wisata yang ada di kota Batam. Selama masa konflik, masyarakat pulau Rempang dan Galang tidak lagi dapat menerima wisatawan lokal

dari kota Batam yang akan berlibur di pantai sekitar pulau Rempang dan Galang (Solidaritas untuk pulau rempang, 2023, hal. 30). Tentunya keadaan ini membuat roda perekonomian pulau Rempang menjadi turun dan berimbas langsung kepada ekonomi masyarakat tempatan.

Perlu diketahui, meskipun kota Batam merupakan kota yang memiliki banyak pantai namun faktanya akses pantai lebih banyak dikuasai oleh pihak swasta yang digunakan untuk bisnis perkapalan ataupun perhotelan. Keadaan ini menyebabkan akses masyarakat Batam untuk menikmati keindahan pantai di kota Batam menjadi terbatas. Hal ini karena sebagian besar pemilik pantai membuat kawasan pantai yang dimiliki menjadi kawasan yang eksklusif, maka dari itu pantai-pantai yang ada di pulau Rempang dan Galang menjadi alternatif pilihan bagi wisatawan lokal dari Batam untuk melepas penat dan berwisata diakhir pekan.

Hasil wawancara kepada pelaku wisata menyatakan bahwa pihak penyedia jasa transportasi wisata kehilangan potensi pendapatan selama masa konflik, hal ini disebabkan wisatawan lokal menjadi takut untuk mengunjungi pantai di pulau Rempang dan Galang. Tidak hanya kehilangan potensi ekonomi dari wisatawan lokal, potensi dari kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) turut berpengaruh akibat konflik yang terjadi. Para pengusaha biro perjalanan wisata mengungkapkan bahwa mayoritas wisman dari Singapura dan Malaysia terpaksa membatalkan atau mengundurkan jadwal kedatangan ke kota Batam akibat khawatir meluasnya konflik. Apalagi pada tanggal 11 september 2023 konflik sudah meluas hingga kekawasan pusat pemerintahan batam center (Habiba et al, 2023). Padahal kawasan ini merupakan tempat salah satu pintu gerbang kedatangan wisman Singapura yaitu pelabuhan laut internasional batam center.

#### **IV. SIMPULAN DAN SARAN**

##### **A. Simpulan**

Provinsi Kepri merupakan salah satu provinsi dengan potensi ekonomi yang besar. Hal ini karena provinsi Kepri berbatasan langsung dengan dua negara tetangga yaitu Singapura dan Malaysia serta berada ditengah selat Melaka yang merupakan salah satu selat

tersibuk di dunia. Salah satu kota yang merupakan lokomotif ekonomi di provinsi Kepri adalah kota Batam. Kota Batam memberikan kontribusi ekonomi kepada Kepri melalui kegiatan perdagangan dan pariwisata.

Kota Batam sebagai kota industri dan kota pariwisata mendapatkan tantangan dari permasalahan konflik di pulau Rempang. Konflik di pulau Rempang tidak hanya berdampak pada rencana investasi manufaktur oleh Pemerintah, namun juga memberikan dampak kepada kegiatan pariwisata. Hal ini karena konflik fisik yang terjadi mempengaruhi niat wisatawan lokal dan wisatawan mancanegara untuk berwisata ke kota Batam. Konflik di pulau Rempang bermula dari rencana Pemerintah untuk menggusur masyarakat tempatan akibat dari rencana pembangunan proyek Eco city.

##### **B. Saran**

Untuk mencegah terjadinya konflik serupa dikemudian hari, maka disarankan kepada Pemerintah untuk melakukan kajian awal dengan melibatkan Perguruan tinggi atau lembaga independen lain. Tujuan kajian awal untuk melihat respon dari masyarakat terhadap rencana pembangunan proyek Eco city. Dari hasil kajian diharapkan dapat membantu Pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan yang dapat menguntungkan masyarakat tempatan sehingga kejadian konflik fisik tidak akan terjadi lagi.

##### **DAFTAR RUJUKAN**

- Abbas, H. 2023. Tragedi Pelanggaran HAM Berat di Pulau Rempang. Diakses melalui <https://edura.unj.ac.id/edura-news/?p=6137>.
- Ashab, M.B. 2023. Warga Rempang Merasa Dihina Walikota Batam. Diakses melalui: <https://ulasan.co/warga-rempang-merasa-dihina-wali-kota-batam/>
- Ayuningmas, N.F., Alfian, A., Ramadhani, N.A. 2023. Resistensi Berbasis Adat: Perlawanan Masyarakat Pulau Rempang, Kota Batam, Kepulauan Riau, Terhadap Rencana Pembangunan Rempang Eco City. Jurnal Inovasi Penelitian.
- Batamnow. 2023. Muhammad Rudi Diskreditkan Harga Rumah Masyarakat Pesisir Rempang, Warga: Ini Sangat Merendahkan Harkat Martabat Kami. Diakses melalui:

<https://batamnow.com/muhammad-rudi-diskreditkan-harga-rumah-masyarakat-pesisir-rempang-warga-ini-sangat-merendahkan-harkat-martabat-kami/>

- Bank Indonesia. 2023. Laporan Perekonomian Provindi Kepri - Riau - Mei 2023. Diakses melalui <https://www.bi.go.id/id/publikasi/laporan/lpp/Pages/Laporan-Perekonomian-Provinsi-Kepulauan-Riau-Mei-2023.aspx>
- Bapenas. 2023. Daftar Kawasan Industri. Diakses melalui <https://katalog.data.go.id/dataset/daftar-kawasan-industri/resource/c720b1c3-ebbf-4059-b535-936a47d1ff29>
- BP Batam. 2023a. Peran BP Batam Mewujudkan Batam Sebagai Lokomotif Perekonomian Kepri. Diakses melalui: <https://bpbatam.go.id/en/peran-bp-batam-mewujudkan-batam-sebagai-lokomotif-perekonomian-kepri/>
- BP Batam. 2023b. Kepala BP Batam Bangun 22 Infrastruktur Jalan Hingga 2024 Mendatang. Diakses melalui <https://bpbatam.go.id/en/kepala-bp-batam-bangun-22-infrastruktur-jalan-hingga-2024-mendatang/>
- BP Batam. 2023c. Pengembangan Pulau Rempang Kepala BP Batam Minta Investor Libatkan Masyarakat. Diakses melalui <https://bpbatam.go.id/en/pengembangan-pulau-rempang-kepala-bp-batam-minta-investor-libatkan-masyarakat/>
- Diskominfo Batam. 2023. Walikota Bangkitkan Pariwisata Batam, Kunjungan Wisman Meroket. Diakses melalui <https://mediacenter.batam.go.id/>
- BP Batam Terhadap Pembangunan Rempang Eco City. Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol. 02, No. 11.
- Habiba, A.N. Melati, A.A. Sa'idah, N.H & Vimayanti, W. 2023. Aktualisasi Hak Asasi Manusia Pada Kasus Pulau Rempang Di Indonesia Dalam Perspektif Lingkungan. Jurnal Hukum Sehasen.
- Hamapu, A. 2023. Protes Penggusuran Pulau Rempang Batam, Masyarakat Melayu-Polisi Bentrok. Diakses melalui <https://www.detik.com/sumut/berita/d-6924948/protes-penggusuran-pulau-rempang-batam-masyarakat-melayu-polisi-bentrok>
- Maulana, F. 2023. Konflik Rempang: Benarkah Mereka Warga Liar?. Diakses melalui <https://umj.ac.id/opini-1/konflik-rempang-benarkah-mereka-warga-liar/>
- Ramadhana, A. 2023. Konflik Agraria Analisis Resolusi Konflik Agraria dan Sumber Daya Alam di Aceh. Jurnal Transformasi Administrasi. Vol 13 no 1.
- Saly, J.N & Ekalia, E. 2023. Status Perlindungan Hukum Kepada Masyarakat Setempat Terkait Relokasi Pulau Rempang. Jurnal Kewarganegaraan Vol. 7 No. 2.
- Solidaritas Nasional Untuk Pulau Rempang. 2023. Keadilan Timpang di Pulau Rempang. Diakses melalui: <https://kontras.org/2023/09/17/peluncuran-laporan-keadilan-timpang-di-pulau-rempang-temuan-awal-investigasi-atas-peristiwa-kekerasan-dan-pelanggaran-ham-7-september-2023-di-pulau-rempang/>
- Fuzain, N, A. 2023. Konflik Sengketa Lahan Antara Masyarakat Adat Rempang Dengan